

**ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
SAAT PROSES PEMILIHAN PENYEDIA**

(STUDI KASUS NO 9/Pdt.G.S/2021/PN KPG)

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



OLEH :

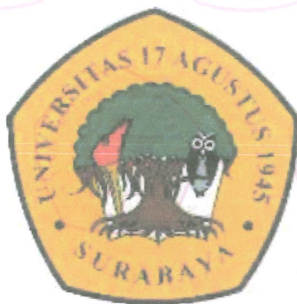
RISMA MARLENO

NIM : 1322000003

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SAAT PROSES
PEMILIHAN PENYEDIA
(STUDI KASUS NO. 9/Pdt.G.S/2021/PN KPG)**

TESIS



Oleh :

Nama : Risma Marleno
NIM : 1322000003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

TESIS

**ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SAAT PROSES
PEMILIHAN PENYEDIA
(STUDI KASUS NO. 9/Pdt.G.S/2021/PN KPG)**

Diajukan Oleh:

Risma Marleno

Nim : 1322000003

MH 44

Telah Disetujui Pembimbing :
Surabaya, 11 Januari 2022

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H



.....

TESIS

**ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SAAT
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
(STUDI KASUS NO. 9/Pdt.G.S/2021/PN KPG)**

Diajukan Oleh:

Risma Marleno

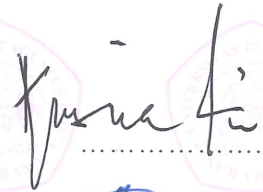
Nim : 1322000003

MH 44

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 17 Januari 2022

Tim Penguji:

Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., MH



Anggota : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H



Anggota : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.



Mengesahkan, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMA MARLENO

NIM : 1322000003

Program : Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan Judul:

ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SAAT PROSES PEMILIHAN PENYEDIA (STUDI KASUS NO. 9/Pdt.G.S/2021/PN KPG)

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya Januari 2022

Hormat saya



RISMA MARLENO



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISMA MARLENO
Fakultas : HUKUM
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SAAT
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
(STUDI KASUS NO. 9/Pdt.G.S/2021/PN KPG)**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



RISMA MARLENO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang telah diberikan sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Tesis yang berjudul: ***“ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SAAT PROSES PEMILIHAN PENYEDIA”***.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai masalah Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Saat Proses Pemilihan Penyedia dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Tidak melupakan jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada:

- Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas segala hal yang telah mewarnai dan memberikan makna baru dalam kehidupan pembelajaran saya.
- Dr. Syofyan hadi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho. M.M, C.M.A., C.P.A., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Teman-teman Magister Hukum Angkatan 44 Universitas 17 Agustus Surabaya, Sarjana Hukum Angkatan Tahun 2021 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah saling membantu, memberi semangat, menginspirasi, dan mendoakan.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, Januari 2022

RISMA MARLENO

ABSTRACT

Procurement of government goods/services is an activity to obtain goods/services by Ministries/Institutions/Regional Work Units/other institutions whose process starts from planning needs until completion of all activities to obtain goods/services through national development carried out by the Indonesian state.

Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services for its derivatives for construction work is the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia No. 14 of 2020 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services Through Providers. Prosecution towards corporations, eventhough closely related to financial.

*Unlawful acts in civil law are called *onrechtmatige daad*. The legal basis is Article 1365 of the Civil Code, which is that every act that violates the law, which brings harm to another person, obliges the person who, because of his mistake, published the loss, to compensate for the loss.*

The legal subjects in this research are ASN (goods users) namely Pokja, PPK and KPA in making policies in the Government PBJ Tender Process. Procedural deviations in the selection/Tender process carried out by the Goods Users are 1) a substantial error in the evaluation process. 2). deviation from the provisions and procedures regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services and the provisions stipulated in the Bidding Document.

One of the acts that harm bidders is to evaluate and determine requirements that deviate or not based on the rules that have been set, and such actions cause losses to the Participants, are categorized as Unlawful Acts with legal sanctions to compensate for material or immaterial losses to participants, in addition to compensation sanctions as well may be subject to light, moderate, or severe disciplinary sanctions, according to Presidential Regulation 12 of 2021, concerning the Procurement of Government goods and services

Keywords: *onrechtmatige daad, Action against the law, Government E-Tender*

RINGKASAN

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga lain dengan melibatkan pihak ke tiga/penyedia. Untuk memperoleh barang/jasa, ada prinsip dasar yang harus diikuti. Prinsip pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah efisien, efektif, terbuka dan kompetitif, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Oleh karena itu, asas-asas dasar tersebut menjadi landasan hukum bagi para pihak (penyedia dan pengguna), dan jika tidak mengikuti asas-asas tersebut, mereka akan menghadapi penegakan hukum.

Subjek hukum atau pelaku adalah pengguna barang yaitu Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengambil kebijakan dalam Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyimpangan prosedur dalam proses pemilihan/Tender yang dilakukan oleh Pokja, PPK dan KPA yang tidak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan Menetapkan Standar evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah normatif- empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang- undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Tata Cara pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 atas perubahan pertama dari Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap turunannya, untuk pekerjaan konstruksi berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Penyimpangan atau Perbuatan Melawan Hukum perdata (PMH) disebut dengan istilah *onrechtmatige daad*. Dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata, adalah Setiap perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum, ada kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian itu. Unsur yang dimaksud dengan ada suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum, dan ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak. Dalam perbuatan melawan hukum ini,

harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausal yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

Perbuatan yang merugikan peserta tender salah satunya melakukan Evaluasi dan Menetapkan persyaratan yang menyimpang atau tidak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Peserta, maka dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan sanksi hukum mengganti kerugian materiil ataupun immaterial kepada peserta, Selain sanksi ganti rugi juga dapat dikenakan sanksi disiplin disiplin ringan, sedang, atau berat, sesuai amanat Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, pasal 8 Tentang Pengadaan Barang jasa Pemerintah.

Setelah Putusan dinyatakan Inkrah (Pokja bersalah) maka, bagaimana kepastian hukum atas pemenang yang sudah berkontrak dengan PPK, Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang jasa Pemerintah menyatakan bahwa, apabila sanggah/banding ditolak maka, Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan.

Kata Kunci: *onrechtmatige daad*, PMH, Perbuatan melawan hukum, E-Tender pemerintah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.5.1 Penelitian Terdahulu.....	8
1.5.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan Masalah	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	20
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	22
1.7 Pertanggungjawaban.....	22
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	25
2.1 Landasan Teori.....	25
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	27
2.1.2 Teori Tujuan Hukum	31
2.1.2.1 Teori Keadilan.....	32
2.1.2.2 Teori Kemanfaatan Hukum	35
2.1.2.3 Teori Kepastian Hukum	36
2.2 Penjelasan Konsep	38
2.2.1 Konsep Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	38
2.2.2 Konsep <i>E-Procurement/E-Tender</i>	40
2.2.3 Konsep Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa	

Nonkontruksi Melalui Penyedia	40
2.2.4 Konsep UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum dan Indonesia Negara Hukum.....	43
2.2.5 Konsep Perbuatan Melanggar Hukum	43
BAB III PEMBAHASAN.....	51
3.1 Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Barang Jasa	51
3.1.1 Subjek Hukum/Para Pihak.....	51
3.1.2 Kronologi Perkara A.....	51
Gugatan Penggugat.....	54
Jwaban Tergugat.....	54
Putusan Majelis Hakim	56
Pertimbangan Hukum.....	57
Sanksi Hukum Atas Pertimbangan Hukum.....	63
Kronologi Perkara B.....	64
Kronologi Perkara C.....	67
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Rekomendasi	73
DAFTAR BACAAN	75